

EKSISTENSI ARSITEKTUR KEAMANAN REGIONAL ASEAN DI TENGAH TREN BILATERALISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Anggun Puspitasari

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 12260
Telp : (021) 5853753 ext 253, Fax : (021)
email : anggunpuspit@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan eksistensi regionalisme dalam bentuk kerangka arsitektur keamanan ASEAN di tengah tren perkembangan bilateralisme negara-negara di Asia Tenggara. Kerangka arsitektur tersebut diwujudkan oleh mekanisme penyelesaian konflik oleh ARF (ASEAN Regional Forum). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis paradoks antara regionalisme dan bilateralisme yang ada di Asia Tenggara serta strategi yang digunakan pemerintah Asia Tenggara dan kekuatan ekstra-regional untuk menjaga satu sama lain terlibat secara konstruktif di kawasan berbasis norma-norma kooperatif yang dapat membantu mereka untuk mencapai kepentingan nasional dan mencegah munculnya hegemoni intramural di wilayah Asia Pasifik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka Teori Keamanan Regional Kompleks (Regional Security Complex Theory/ RSCT), Teori English School, dan konsep Balance of Influence untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan menemukan bahwa meskipun berada di tengah-tengah tren bilateralisme, kerangka arsitektur keamanan regional ASEAN telah berhasil menjaga keseimbangan kekuatan-kekuatan ekstra-regional di kawasan.

Pertanyaan Penelitian: “Mengapa regionalisme ASEAN dalam bentuk inisiatif kerangka arsitektur keamanan tetap dipertahankan di tengah tren bilateralisme negara-negara di kawasan Asia Tenggara?”

Kata Kunci: ASEAN, English School, ASEAN Regional Forum, Bilateralisme, Regionalisme, Arsitektur Keamanan, Kekuatan Regional, dan kekuatan Ekstra-regional

I. Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang mengandung berbagai bibit konflik potensial, baik domestik, maupun antar negara dan regional. Perang dingin telah menciptakan perubahan yang besar di kawasan ini, dan hal ini sangat berkaitan dengan pola hubungan antar negara-negara besar. Ancaman-ancaman baru yang muncul di kawasan Asia Tenggara setelah Perang Dingin berakhir antara lain berupa akuisisi pengadaan senjata oleh negara-negara anggota ASEAN, mencairnya sengketa teritorial yang telah dibekukan selama Perang Dingin, munculnya Cina sebagai negara hegemon, dan prevalensi ketegangan etnis di seluruh kawasan. Ancaman-ancaman tersebut menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara telah memasuki masa ketidakpastian strategis.¹

Dalam ketidakpastian strategis ini, ASEAN sebagai organisasi regional yang menjamin stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara sadar bahwa diperlukan adanya sebuah “mekanisme keamanan baru” untuk menghadapi hal tersebut, dan bahwa ASEAN sendirilah yang bertanggung jawab atas perdamaian, keamanan dan stabilitas dari wilayah dan kawasan Asia Tenggara. Mekanisme itu perlu dimunculkan untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan ini demi mewujudkan konsep CBM (Confidence

¹ Allan Collins, (2000), *The Security Dilemmas Of Southeast Asia*, London: Palgrave Macmillan Press, Hal. 1.

Building Measure) dan diplomasi preventif menuju “masyarakat kepentingan keamanan bersama” di Asia Tenggara dan demi membangun lingkungan strategis yang dapat diandalkan.²

1.1. Inisiatif Pembentukan Arsitektur Keamanan Regional

ASEAN kemudian membentuk suatu arsitektur keamanan regional di kawasan Asia Tenggara, dan yang termasuk di dalamnya adalah ARF (*ASEAN Regional Forum*) sebagai *security framework* ASEAN serta inisiatif pembentukan ASEAN sebagai suatu komunitas keamanan dalam ASC (*ASEAN Security Community*). Arsitektur keamanan regional ini merupakan proyeksi dari instrumen *Confidence Building Measure* (CBM), resolusi konflik dan *preventive diplomacy* sebagai sifat dari regionalisme ASEAN. Selain itu, pembentukan arsitektur keamanan regional ini merupakan salah satu strategi ASEAN dalam mempertahankan sentralitasnya di kawasan Asia Tenggara, yaitu untuk mengembangkan rasa kerjasama regional yang lebih luas demi membangun rasa percaya dengan berbagai kekuatan intra-regional, khususnya Cina dan AS.³

Pembentukan Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ ARF) pada tahun 1993 merupakan usaha ASEAN yang pertama untuk memultilateralisasi keamanan di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.⁴ Multilateralisasi ini diharapkan dapat menjamin hubungan kerjasama antar negara kawasan Asia Tenggara dalam kepentingan dan masalah bersama dengan intensitas yang lebih besar, dengan demikian ARF dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan kerjasama antar negara dengan baik. ARF juga merupakan suatu mekanisme untuk membangun rasa kepercayaan (CBM) di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri serta untuk memperluas kesempatan pengendalian dan penyeimbangan agresifitas para mitra dialog dan negara-negara Asia Pasifik yang berpotensi memiliki ambisi hegemonik.⁵

Bahkan menurut pandangan Neo-Liberal, ASEAN Regional Forum (ARF) tidak hanya berfungsi sebagai forum keamanan, tetapi juga merupakan wahana yang lebih luas untuk mengusahakan kerjasama politik, keamanan, serta ekonomi negara-negara anggota ASEAN dengan *external powers* terutama Cina dan AS sesuai dengan *national interest* masing-masing negara.⁶ Sebagai satu-satunya forum dialog keamanan di luar PBB, yang dihadiri kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, Uni Eropa dan Jepang, pembahasan dan tukar pandangan dalam ARF memiliki makna penting dan strategis. Proses ARF mencerminkan norma yang berlaku di Asia Tenggara yang berupa “ASEAN Way”, yaitu menjalin hubungan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kebiasaan berdialog serta berkonsultasi dalam masalah-masalah keamanan.⁷

Sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu pilarnya yaitu pilar politik dan keamanan, pada ASEAN Concord II di Bali, Oktober 2003, ASEAN mengemukakan usulannya mengenai pembentukan ASC (*ASEAN Security Community*) pada tahun 2020. Pembentukan ASC merupakan sebuah upaya diplomatik yang bertujuan untuk menumbuhkan dialog dalam mengatasi berbagai persoalan keamanan di kawasan. Terbentuknya ASC menandai terciptanya jaringan kerjasama keamanan multilateral (*webs of multilateral cooperations*) baru di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) khususnya.⁸ ASC akan memberikan kontribusi untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan lebih lanjut di kawasan Pasifik. Dalam hal ini, ASC bersifat terbuka dan *outward looking*, melibatkan partner ASEAN dan ARF untuk

² Bantarto Bandoro (Ed.), (1996), *Agenda dan Penataan Keamanan Di Asia Pasifik*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, hal. 87.

³ Lina A. Alexandra, (2010), “ASEAN di tengah multilateralisme Asia: tantangan dan peluang bagi sentralitas ASEAN”, *analisis CSIS* 39 (4), hal. 446.

⁴ Rizal Sukma, (2005), “Multilateral Security Framework In Northeast Asia: A View From Southeast Asia”, *The Indonesian Quarterly* 33 (3): 260.

⁵ *Ibid.* hal 265.

⁶ Hiro Katsumata, (2006), “Establishment Of The ASEAN Regional Forum”, *Pacific Review* 19 (2): 183.

⁷ ASEAN Selayang Pandang, (2007), Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

⁸ Yuli Fuziatni, et. al, (2005), “ASEAN SECURITY Community: background and prospect”, *SOSIOSAINS* 18(2): 378.

mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. ASC akan mencerminkan tekad ASEAN untuk bergerak maju dalam sektor keamanan sebagai taraf lanjutan setelah ARF. Dalam hal ini, ASC akan memperkuat peran ASEAN sebagai *driving force* dalam ARF.⁹ Pada perkembangannya, Inisiatif untuk mewujudkan komunitas keamanan ASEAN yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2020 tersebut dipercepat menjadi tahun 2015 setelah ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007.

1.2. Tren Bilateralisme Asia Tenggara

Di tengah inisiatif pembentukan arsitektur keamanan regional, di ASEAN sendiri pendekatan bilateral dan trilateral untuk mengelola keamanan di wilayah ini justru berkembang sebagai *building-blocks* bagi keamanan di Asia Tenggara. Pendekatan ini pada satu pihak melengkapi dan meningkatkan kerjasama multilateral, namun di pihak lain merupakan kendala bagi eksistensi bentuk regionalisme ASEAN. Pada praktiknya, ASEAN jarang menggunakan mekanisme formal-institusional untuk menyelesaikan sengketa antar anggotanya. Mereka cenderung menggunakan mekanisme informal bilateral yang didasarkan pada norma *ASEAN Way*.¹⁰ Memang benar masalah-masalah keamanan bilateral yang lebih banyak jumlahnya di Asia Tenggara jarang sekali disalurkan ke penyelesaian multilateral. Masalah-masalah keamanan internal lebih banyak dikelola melalui mekanisme bilateral. Usaha penyelesaiannya dilakukan melalui pertemuan bilateral atau trilateral kepala pemerintah.¹¹

Terlebih lagi, negara-negara ASEAN lebih memberikan preferensi kepada mekanisme informal daripada yang formal. Memang, pendekatan informal memberikan suatu negara kebebasan dan fleksibilitas gerak daripada pendekatan formal. Para pemimpin ASEAN memberikan perhatian lebih kepada dialog daripada mekanisme kerjasama yang spesifik. Proses dialog secara bilateral ini juga merupakan salah satu bentuk upaya mewujudkan CBM yang penting, karena proses memungkinkan para pemimpin ASEAN menukarkan pandangan secara periodik menuju konsep saling percaya tersebut.¹² Negara-negara anggota ASEAN berkembang di luar kerangka kelembagaan keamanan kolektif dengan membangun kolaborasi bilateral mengenai pertahanan dan masalah keamanan, kolaborasi tersebut dikenal sebagai pendekatan “*spider web*”. Kolaborasi bilateral ini melibatkan kekuatan pertahanan nasional dari enam negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Brunei). Hasilnya adalah bilateralisme yang tumpang tindih dengan mekanisme arsitektur keamanan regional.¹³

Kerjasama bilateral keamanan dan pertahanan umumnya berbentuk aliansi militer yang diwujudkan dengan latihan bersama; kaitan pengendalian komando dan inteligensi; pengawasan dan patroli bersama; pemanfaatan fasilitas bersama; rasionalisasi pertahanan dan logistik; produksi senjata dan pertahanan militer; serta pertemuan para komandan. Kerjasama militer antara negara-negara ASEAN pertama-tama disebabkan oleh keprihatinan dengan perkembangan tensi keamanan kawasan. Kekalahan Amerika Serikat di Vietnam, pengkomunisan Indocina, invasi dan pendudukan Vietnam di Kamboja, aliansi militer strategis antara Uni Soviet dengan Vietnam melalui Teluk Cam Ranh, membesarnya kekuatan militer RRC dan India, serta luasnya kemampuan angkatan laut Jepang, kesemuanya merupakan latar belakang terbentuknya kerjasama militer antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kerjasama pertahanan antara anggota lama dan anggota baru ASEAN telah juga berjalan secara bilateral. Mulai dari tahun 1995, negara-negara Indocina secara bertahap ditarik ke dalam

⁹ ASEAN Security Community Plan of Action, diakses dari <http://www.aseansec.org/16826.htm> pada tanggal 11 November 2013.

¹⁰ Hilton Tanaka, Eka. A, (2011), mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 36.

¹¹ C.P.F Luhulima, (2011), *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 381.

¹² C.P.F Luhulima, “masa depan ASEAN Regional Forum (ARF)”, dalam Bantarto Bando (Ed.), (1996), *Agenda dan Penataan Keamanan Di Asia Pasifik*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, hal. 95.

¹³ See Seng Tan, Amitav Acharya, (Ed), (2004), *Asia-Pacific Security Cooperation, National Interest And Regional Order*, New York: M.E. Sharpe, Inc, Hal. 11.

pola kerjasama pertahanan bilateral dengan ASEAN. Dimulai dengan Vietnam menjalin hubungan pertahanan dengan Filipina, serta Indonesia dan Thailand. Meskipun tawaran oleh Thailand untuk mendirikan sebuah 'garis batas' antara Hanoi dan Bangkok ditolak oleh Vietnam karena masih ada rasa kecurigaan menyangkut tumpang tindih klaim atas teluk Thailand, namun pada saat itu, Filipina telah menawarkan fasilitas pelatihan bagi petugas Vietnam di akademi militer untuk bertukar peralatan dan menggelar latihan angkatan laut bilateral. Hal ini telah menunjukkan keinginan Filipina untuk bekerjasama dalam menjaga pertahanan dan rekondisi peralatan perang.¹⁴

Program latihan militer bilateral Indonesia dan Malaysia dianggap yang paling komprehensif sifatnya. Karena mencakup latihan bersama antara ketiga unsur angkatan perang. Darsasa Malindo terakhir dilakukan pada permulaan Juli 2006 yang terdiri dari maneuver pasukan TNI/ATM, baik Berupa Bantuan Tembakan Langsung Udara (SUL) oleh pesawat-pesawat Hawk 100/200 TNI AU dan f-18 Hornet dari TUDM, pendaratan pasukan pandarat dari mariner TNI AL dan Paska dari TLDM serta penerjunan pasukan Linud dari kedua negara di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di daerah Kalimantan.¹⁵

Kerjasama keamanan bilateral antar negara Asia Tenggara tidak terbatas hanya antara Indonesia dan Malaysia saja, melainkan juga negara-negara terkecil seperti Brunei, dan Singapura. Singapura mempunyai kerjasama militer dengan Malaysia dan Thailand, terutama kerjasama antar angkatan laut dan udara, sedangkan Brunei mempunyai kerjasama keamanan dengan Malaysia dan Singapura. Hubungan ini akan memungkinkan negara terkecil muncul sebagai mitra pertahanan bilateral di Asia Tenggara. Singapura juga mempunyai kerjasama militer dengan Filipina yang diresmikan pada Mei 1994, yang sudah diaplikasikan kedalam latihan bersama di negara itu dengan sebutan Anoa-Singa 2/92.

Bentuk penyelesaian masalah keamanan antar negara anggota juga umumnya dilakukan melalui mekanisme bilateral. Mekanisme ini sesungguhnya sudah dijalankan pada saat awal pembentukan ASEAN sampai sekarang. Contohnya dalam penyelesaian sengketa terkait atas klaim wilayah Sabah (Kalimantan Utara). Usaha untuk mendekatkan kedua belah pihak (Filipina-Malaysia) yang bersengketa pada masa itu atas dukungan pihak Indonesia dirintis oleh para pejabat departemen luar negeri Thailand pada bulan Juni-Juli 1968 di Bangkok. Pihak tuan rumah mengundang dan mempertemukan wakil-wakil kedua negara guna membicarakan langkah-langkah "menjernihkan" klaim kedaulatan Filipina atas Sabah dan mencari suatu penyelesaian (*mode of settlement*) terbaik bagi kedua belah pihak.¹⁶

Pada Juli 2008, ketegangan pada perbatasan Thailand-Kamboja di Kuil Preah-Vihear menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN. Peristiwa tersebut menimbulkan ide bagi pemerintah Kamboja untuk membawa isu tersebut ke forum ASEAN dalam ARF dan ICJ (*International Court of Justice*). Namun, pemerintah Thailand lebih memilih menggunakan penyelesaian secara bilateral. Pilihan penyelesaian sengketa pada akhirnya dilakukan secara bilateral antara Thailand dan Kamboja.¹⁷

Adalah sebuah paradoks bahwa bentuk regionalisme ASEAN dalam inisiatif arsitektur keamanannya terus di pertahankan justru dalam tren bilateralisme di negara-negara Asia Tenggara. Ada indikasi bahwa negara-negara anggota ASEAN itu sendiri kurang mempercayai efektifitas dari fungsi esensial arsitektur keamanan sebagai bentuk kristalisasi sifat regionalisme ASEAN, yaitu CBM (*Confidence Building Measure*), *preventive diplomacy* dan *conflicts resolution*. Negara-negara tersebut justru lebih mempercayakan penyelesaian konflik kepada mekanisme bilateral dan melakukan upaya diplomasi preventif melalui kerjasama bilateral keamanan yang dapat membantu tercapainya kondisi transparansi militer (CBM) di antara mereka.

Namun, pada kenyataannya bentuk regionalisme ASEAN dalam ASC dan ARF tersebut masih terus dikembangkan bahkan memiliki peningkatan mitra dialog negara-negara di luar Asia Tenggara secara signifikan. AS dan Cina yang menjadi mitra dialog terus berperan aktif sebagai *observer* dalam memantau pengambilan keputusan ARF dan menjadi katalisator dalam upaya pencapaian ASC 2015. Oleh karena itu,

¹⁴ Amitav Acharya, (2000), *Constructing Security Community in Southeast Asia*, London: Routledge, hal. 151.

¹⁵ C.P.F Luhulima, (2011), *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 382

¹⁶ Asvi Warman Adam, *et. al.*, (1999), *Konflik Teritorial Di Negara-Negara ASEAN*, laporan hasil penelitian LIPI (tidak diterbitkan) hal. 14.

¹⁷ Hilton Tanaka, Eka. A, (2011), mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 136.

menarik bagi penulis untuk menganalisis mengenai fenomena eksistensi pencapaian bentuk regionalisme di tengah perkembangan bilateralisme tersebut.

II. Pertanyaan Penelitian

Arsitektur keamanan ASEAN merupakan salah satu bentuk regionalisme di Asia Tenggara. Bentuk regionalisme tersebut masih dipertahankan dalam eksistensi perkembangan *ASEAN Regional Forum (ARF)* dan inisiatif upaya pembentukan tercapainya *ASEAN Security Community (ASC)*. Akan tetapi dalam penyelesaian konflik dan upaya pembentukan transparansi militer dalam instrumen *CBM (Confidence Building Measure)*, mekanisme bilateral justru lebih dipercaya dan terus dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Mengapa regionalisme ASEAN dalam bentuk inisiatif kerangka arsitektur keamanan tetap dipertahankan di tengah tren bilateralisme negara-negara di kawasan Asia Tenggara?”

III. Kerangka Pemikiran

Sebagai landasan untuk melakukan analisa, penulis akan menggunakan *Regional Security Complex Theory (RSCT)* dan *English school theory*, sedangkan untuk konsep, penulis akan menggunakan konsep *overlay* dan *Balance of Influence* yang diwujudkan dengan *hedging strategy* yang akan menghubungkan perilaku dan kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap negara-negara *super power* dan implikasinya terhadap eksistensi bentuk regionalisme keamanan kawasan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tingkat analisa sistem regional. Karena penulis akan meneliti eksistensi regionalisme keamanan ASEAN dalam bentuk inisiatif kerangka keamanan di tengah perkembangan bilateralisme negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka penulis menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen yang berupa eksistensi bentuk regionalisme ASEAN (unit analisis) serta variabel independen yang berupa tren bilateralisme di kawasan Asia Tenggara (unit eksplanasi).¹⁸

3.1. Regional Security Complex Theory (RSCT)

Teori Kompleksitas Keamanan Regional (*Regional Security Complex Theory/ RSCT*) menurut Barry Buzan dan Ole Wæver adalah: “*a set of units whose major processes of securitization, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another*”¹⁹. Buzan dan Wæver menegaskan bahwa proses penyelesaian masalah keamanan dan sekuritisasi di suatu kawasan bersifat kompleks dan tidak dapat dipisahkan dan diselesaikan secara terpisah antara satu dan yang lain. Menurut mazhab Copenhagen yang menjadi rujukan utama dalam studi keamanan kontemporer, proses sekuritisasi merupakan hasil konstruksi. Artinya, suatu isu menjadi masalah keamanan karena ada aktor-aktor yang mewacanakannya dengan mengatakan bahwa isu tersebut berpotensi mendatangkan ancaman eksistensial bagi suatu entitas. Entitas di sini bisa berupa negara maupun non-negara. Dengan demikian, suatu isu menjadi masalah keamanan bukan semata-mata karena pada dasarnya isu itu memang berbahaya dan merupakan ancaman, melainkan lebih karena hasil “promosi” para aktor tersebut.²⁰

Menurut Buzan dan Wæver, interdependensi di bidang keamanan terjadi lebih intens dan kompleks di antara unit-unit di dalam suatu *region* tersebut dibandingkan unit luar mereka. *Security Complex* adalah intensitas relatif dari hubungan keamanan yang menyebabkan terbentuknya suatu pola khas suatu hubungan di kawasan oleh distribusi kekuasaan baik dari dalam maupun dari luar, baik itu berupa hubungan persahabatan (*amity*) maupun ancaman permusuhan

¹⁸ R.F. Hopkins, R.W. Mansbach, *structure and process in international politics*, dalam Mochtar Mas’oed, (1990), *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, hal. 39.

¹⁹ Jaap de Wilde, Ole Wæver, Barry Buzan, (1998), *Security: A new Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner Publisher, hal. 201.

²⁰ *ibid*, hal. 203.

(*enmity*).²¹ Salah satu tujuan RSCT adalah untuk menjelaskan serta menganalisis kecenderungan tekanan berlebih pada peran kekuatan besar di suatu kawasan, dan untuk memastikan bahwa faktor-faktor lokal diberikan proporsi yang sesuai dalam menganalisis bentuk kepentingan keamanan. Bentuk standar untuk RSCT adalah pola persaingan, keseimbangan neraca kekuasaan, dan pola aliansi antara kekuatan-kekuatan utama di kawasan (untuk pola ini kemudian dapat ditambahkan efek dari penetrasi atau *overlay* kekuatan eksternal).

Teori RSCT ini penulis gunakan untuk menganalisis tumpang tindih pola kepentingan negara mitra dialog ASEAN dalam ARF dan upaya pembentukan ASC. RSCT dapat mendeterminasi pola hubungan seperti apa yang nanti akan dan sedang diimplementasikan antara negara-negara mitra dialog dengan kekuatan regional di Asia Tenggara. RSCT menyediakan kerangka konseptual yang menangkap struktur baru yang muncul pada konstelasi keamanan internasional (1 (*global Power*) + 4 (*great power*) + *region powers*).²² Buzan mengkategorikan AS sebagai sebuah *global power*, serta Jepang, Cina, Rusia, dan EU sebagai *great powers*.²³

Dalam RSCT, dampak dari tumpang tindih pola kepentingan 'kekuatan' tersebut didefinisikan dalam konsep '*overlay*' dan '*penetration*'. Kedua konsep ini dapat menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan tersebut dapat menanamkan pengaruh dan kepentingannya dalam bentuk regionalisme keamanan di Asia Tenggara.

Konsep penetrasi yang dikemukakan Buzan dan Wæver adalah: “*What links the overarching pattern of distribution of power among the global powers to the regional dynamics of RSCs is the mechanism of penetration. Penetration occurs when outside powers make security alignments with states within an RSC*” yaitu pola menyeluruh dari distribusi kekuasaan di antara kekuatan global dengan dinamika regional. Penetrasi terjadi bila kekuatan-kekuatan luar membuat keberpihakan keamanan dengan negara-negara dalam suatu kawasan, dan melakukan pendekatan persuasif.

Konsep *overlay* menurut Barry Buzan dan Ole Wæver adalah:

“*when the interests of external great powers transcend mere penetration, and come to dominate a region so heavily that the local dynamics of security interdependence virtually cease to operate. It usually results in the long-term stationing of great power armed forces in the region, and in the alignment of the local states according to the patterns of great power rivalry*”²⁴

ketika kepentingan kekuatan-kekuatan besar eksternal melampaui batas penetrasi belaka, dan datang untuk mendominasi kepentingan keamanan kawasan, pada akhirnya akan menghasilkan dinamika interdependensi keamanan lokal terhenti, dan akibat dari hal tersebut adalah pembentukan pola baru pada persaingan kepentingan dan distribusi kekuatan kawasan, yaitu menjadi terfokus hanya pada kepentingan kekuatan-kekuatan besar dan pola persaingan kekuatan antara mereka.

Dalam konteks regionalisme keamanan Asia Tenggara, Buzan mengkategorikan masuknya kekuatan eksternal di kawasan Asia Tenggara sebagai “*heavily penetrated*” bukan semata-mata sebagai penetrasi biasa sekalipun bukan juga *overlay*. ASEAN digunakan oleh *global power* sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional.²⁵ ARF dan ASC merupakan kerangka arsitektur keamanan di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai *dialog partner* berupa negara-negara yang dikategorikan sebagai *super power* dan *great power* tersebut. Tercatat hingga saat ini ARF mempunyai 27 anggota tetap berupa negara anggota ASEAN, dan 17 mitra dialog. Sebagai institusi dengan begitu banyak anggota, ARF beresiko kehilangan beberapa skala efektifitasnya. ARF terlalu banyak memakan waktu

²¹ *Ibid*, hal. 202.

²² Barry Buzan, Ole Wæver, (2003), *Regions and Powers: The Structure of International Security*, New York: Cambridge University Press, hal. 40.

²³ *ibid*, hal. 49.

²⁴ *Ibid*, hal 61.

²⁵ *ibid*, hal. 62.

bahkan untuk mencapai suatu konsensus sederhana sekalipun, karena banyak kepentingan mitra dialog yang diperhitungkan.²⁶

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa mitra dialog disini tidak hanya berperan sebagai sebuah komponen pengawas, melainkan terdapat kepentingan-kepentingan lain yang di agendakan dalam setiap pertemuan dan forum inisiatif kerangka arsitektur keamanan ASEAN. Khususnya dalam ARF, sebagai contoh, Cina menggunakan forum tersebut sebagai salah satu strategi dalam men-counter kekuatan AS dan begitu pula sebaliknya tetapi kepentingan *global power* ini tidak cukup dominan untuk mendominasi kepentingan regional.²⁷ Hal ini dimungkinkan karena dalam kawasan Asia Tenggara terdapat norma *ASEAN Way* yang dilembagakan dalam TAC (*Treaty of Amity Cooperation*) dan ARF yang tidak memungkinkan adanya intervensi terhadap kedaulatan negara-negara ASEAN.²⁸

3.2. School Theory

English School merupakan sebuah aliran yang muncul di Inggris pada periode 1970'an, di sepanjang perang dingin dimana objek analisa utamanya adalah *international society* (masyarakat internasional). Aliran ini memiliki pemahaman dan perspektif yang berbeda dalam memandang studi hubungan internasional yaitu penolakan mereka pada tantangan kaum behavioralis dan menekankan pendekatan tradisional yang berdasarkan pada pemahaman, penilaian, norma-norma, dan sejarah manusia. Mereka juga menolak setiap pemilahan yang tegas antara pandangan kaum realis semata dengan pandangan kaum liberal tentang hubungan internasional.²⁹

Teori *English School* digunakan untuk menganalisis pelembagaan kepentingan bersama dan identitas antara negara-negara di bawah aturan norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku di sebuah kawasan merupakan hasil kompromi dan kesepakatan antara aktor-aktor regional. *English School* dibangun dari hasil persinggungan 3 teori-teori Hubungan Internasional sebelumnya, yaitu Realisme dalam sistem internasional (Hobbes/Machiavelli), Rasionalisme dalam masyarakat internasional (Grotius), dan Revolusionisme dalam masyarakat dunia (Kant).³⁰ Pada perkembangannya *English School* mengacu pada tesis Grotius mengenai masyarakat internasional yang dilembagakan melalui norma.

Shaun Narine berpendapat bahwa cara terbaik untuk memahami ASEAN adalah dengan memanfaatkan sudut pandang dari teori *English School* (ES). Narine menunjukkan bahwa teori ES memiliki beberapa sudut pandang yang berbeda dari beberapa pendekatan lain dalam hubungan internasional, khususnya konstruktif. Hal ini membuat teori ES sangat berguna untuk menganalisis hubungan yang terjalin di kawasan Asia Tenggara sejak pembentukan ASEAN di tahun 1967. Narine mencatat bahwa negara anggota ASEAN terlalu fokus untuk mempertahankan kedaulatan mereka dibandingkan untuk membangun identitas regionalisme ASEAN. Dia menyatakan bahwa penekanan pada kedaulatan ASEAN dan non-intervensi lebih relevan untuk diinterpretasikan dalam teori ES. Analisis Narine adalah penting karena menunjukkan bagaimana pendekatan baru ES dapat digunakan di tingkat regional di bagian dunia lain selain Eropa.³¹

Salah satu norma yang berlaku di ASEAN adalah mekanisme "*ASEAN way*". Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *ASEAN Way* merupakan cara penyelesaian konflik gaya ASEAN. Walaupun tidak tertuang secara implisit dalam dokumen resmi ASEAN, namun prinsip-prinsip tersebut telah menjadi

²⁶ Ellen L. Frost, (2008), *Asia's New Regionalism*, Singapore: Lynne Rienner Publishers, hal 137.

²⁷ Barry Buzan, (2003), *Security Architecture In Asia: The Interplay Of Regional And Global Levels*, *Pacific Review* 16(2): 155.

²⁸ Shaun Narine, (1997), "ASEAN and the ARF The Limits of the 'ASEAN Way' ", *ASIAN SURVEY* 37(10): 962.

²⁹ Andrew Linklater, (2005), "The English School" dlm Scott Burchill et. Al. *Theories of International Relations Third edition*, New York: Palgrave Macmillan, Hal. 84.

³⁰ Barry Buzan, (2004), *From International to World Society?: English School Theory and The Social Structure Of Globalization*, New York: Cambridge University Press, hal. 7.

³¹ Amitav Acharya, Richard Stubbs, (2006), *Theorizing Southeast Asian Relations: an introduction*, *Pacific Review* 19 (2): 129.

landasan politik penting bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menjalin hubungan satu sama lain. Sendi-sendi normatif yang terkandung dalam *ASEAN Way*, antara lain prinsip untuk saling menghormati kedaulatan, egaliter, non-konfrontatif, non-legalistik, dan pragmatis.³²

Menurut Narine, *The ASEAN Way* telah memungkinkan ASEAN untuk bertahan eksistensinya dengan tanpa mendorong organisasi tersebut untuk mengintervensi terlalu jauh melampaui apa yang telah dirumuskan. Pengambilan keputusan ASEAN didasarkan pada dicapainya suatu konsensus. *ASEAN Way* juga mengkondisikan anggotanya untuk tidak terlalu berkonsentrasi pada ancaman konflik. Masalah keamanan yang dapat diselesaikan diarahkan kepada sistem *restrain attitude* (menyimpan di bawah karpet) atau disisihkan sehingga tidak mengganggu kerjasama di bidang lainnya. *ASEAN Way* merupakan norma yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan untuk melembagakan dan meyakinkan kekuatan ekstra regional dan kekuatan regional agar merasa nyaman dalam melibatkan diri untuk bekerjasama demi mencapai kepentingan nasionalnya dengan ASEAN.

ASEAN adalah simbol dari komitmen anggotanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui prinsip non intervensi dan menjunjung tinggi hak-hak negara berdaulat. *ASEAN Way*, sebagai norma sosial-budaya ASEAN adalah mekanisme yang menekankan hak-hak negara 'untuk membuat keputusan mandiri tanpa intervensi atau tekanan dari ASEAN - yakni memperkuat kedaulatan negara. Hal ini diterapkan dalam gaya penyelesaian konflik dalam ARF, sebelum dialog ARF dilaksanakan, negara anggota yang terlibat konflik hendaknya membicarakan hal tersebut secara bilateral untuk mencapai suatu konsensus terlebih dahulu yang nantinya akan dirumuskan di dalam ARF.³³ Oleh karena itu mekanisme *ASEAN way* dapat dikatakan sebagai norma yang menguatkan adanya tren bilateralisme di Asia Tenggara sekaligus sebagai norma yang bisa melembagakan kekuatan ekstra regional dan kekuatan regional dalam suatu arsitektur keamanan.

3.3. Balance of Influence (Hedging Strategy)

Konsep *Balance of Influence* merupakan bentuk evolusi dari konsep *Balance of Power* (Morgenthau/1920) dan *Balance of Threat* (Stephen M. Walt/1987). Robert Ross menyebutkan Konsep *Balance of Power* secara universal mengabaikan variabel interdependensi ekonomi dalam sistem global dan hanya berfokus pada basis kekuatan militer.³⁴ Begitu pula dengan konsep *Balance of Threat* yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan *balancing* secara konfrontatif dengan ancaman-ancaman yang muncul (*threat*). Kedua konsep ini tidak menyediakan alternatif untuk melakukan kerjasama kooperatif dengan negara-negara yang dianggap sebagai *challenger* maupun ancaman (*threat*). Padahal dengan semakin kompleksnya konstelasi kepentingan aktor-aktor dalam tatanan global saat ini, dibutuhkan konsep yang lebih kooperatif dalam menganalisa perilaku sebuah negara untuk mencapai kepentingannya. Oleh karena itu Evelyn Goh, menyediakan alternatif baru dalam menganalisis perilaku negara-negara tersebut, yang tidak lain adalah konsep *Balance of Influence* yang diwujudkan dengan strategi *hedging*.

Goh mendefinisikan *hedging* sebagai satu paket strategi yang bertujuan untuk menghindari (atau direncanakan sebagai suatu hal yang kebetulan) sebuah situasi anarki dimana terdapat *clash interest and ideology* antara negara hegemon dan *challenger* di suatu tatanan internasional dan negara-negara di luar kedua kategori tersebut tidak dapat memutuskan untuk melakukan alternatif *balancing*, *bandwagoning* atau bersikap netral. Sebaliknya negara di luar kedua kategori tersebut memilih berada di tengah-tengah dengan melakukan kerjasama yang menguntungkan dengan keduanya atau menghindari untuk memilih berada di salah satu sisi (negara *balancer* atau hegemon).

Hal ini seperti ditegaskan Goh dalam tulisannya yang berjudul *Understanding 'Hedging' in Asia-Pacific Security*, menjelaskan strategi *hedging* sebagai:

³² Anik Yuniarti, (2009), ASEAN Way: Mekanisme "Cara ASEAN" Dan Relevansinya, *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan* 1(1): 1

³³ Shaun Narine, (2006), The English School And ASEAN, *The Pacific Review* (19)2: 204.

³⁴ Robert S. Ross, (2006) "Balance of Power Politics and the Rise of China: Accommodation and Balancing in East Asia", *Security Studies* 15(3).

*"a set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straightforward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality. Instead they cultivate a middle position that forestalls or avoids having to choose one side [or one straightforward policy stance] at the obvious expense of another"*³⁵

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, Goh menyatakan terdapat negara-negara yang dikategorikan sebagai negara hegemon dan negara *lead-balancer*. Goh mengklasifikasikan Cina sebagai negara hegemon di kawasan Asia Tenggara melihat agresifitas pertumbuhan dan sifatnya yang ekspansif di kawasan tersebut, baik dalam bidang pertumbuhan akuisisi ekonomi maupun modernisasi militer. Dalam hal ini Amerika Serikat muncul sebagai *lead balancer* demi menandingi pertumbuhan dan status quo Cina di kawasan tersebut.³⁶

Strategi *hedging* ini penulis gunakan untuk menganalisis strategi negara-negara anggota ASEAN dalam menyikapi munculnya negara hegemon dan *balancer* di kawasan Asia Tenggara. *Hedging* juga digunakan untuk menganalisis strategi negara-negara mitra dialog untuk mencapai kepentingannya dalam ASEAN Regional Forum. Terdapat kekhawatiran akan terjadinya ketidakstabilan sistem multipolar di kawasan tersebut oleh negara-negara kecil dan menengah dikarenakan adanya persaingan kepentingan antara negara hegemon dan *balancer* di dalam tatanan ASEAN. Oleh karena itu negara-negara kecil di kawasan Asia Tenggara menggunakan strategi *hedging* sebab tidak memungkinkan untuk menggunakan strategi *balancing* dan *bandwagoning* secara murni dengan negara-negara kuat.³⁷

Menurut Goh, ada tiga bentuk elemen dalam strategi *hedging* yang harus di implementasikan di kawasan Asia Tenggara oleh negara-negara kecil dan menengah di dalamnya, yaitu *Indirect Balancing (Soft Balancing)*, *Complex Engagement*, dan *enmeshing a number of regional powers*.³⁸ *Indirect Balancing* merupakan kebijakan yang diciptakan untuk menghadapi kemampuan negara hegemon dengan menjalin hubungan baik dengan negara *balancer*-nya, dapat dilakukan melalui *non-spesific deterrence*, yaitu penguatan pertahanan, maupun membangun hubungan diplomatik, dan politik dengan negara *balancer* yang dapat menjadi pendukung negara ketika hubungan dengan negara hegemon menjadi buruk.³⁹ *Indirect balancing* ini dapat diimplementasikan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan membujuk Amerika untuk berpartisipasi sebagai *observer* dalam ARF untuk meng-*counter* kekuatan Cina yang terlibat dalam permasalahan keamanan di ASEAN seperti konflik Laut Cina Selatan.

Complex engagement (keterlibatan kompleks) merupakan pendekatan terhadap negara hegemon (Cina). Pada tingkat politik, keamanan, dan strategi dengan harapan pemimpin Cina dapat dipengaruhi atau disosialisasikan untuk mematuhi peraturan dan norma-norma yang berlaku di ASEAN, khususnya dalam pertemuan ARF. ARF dapat menjadi suatu forum yang dapat membuat negara-negara anggota ASEAN berinteraksi dengan Cina untuk selanjutnya mendekatkan diri demi tercapainya kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam hal ini, kebijakan *engagement* dapat dipahami sebagai sebuah *constructive hedge* yang meredam agresivitas dominasi potensial Cina namun tetap menguntungkan negara-negara anggota ASEAN.⁴⁰

Elemen yang terakhir merupakan *enmeshing a number of regional powers*, dimana *hedging* merupakan sebuah kebijakan umum akan mengumpulkan (*enmeshing*) kekuatan besar di regional dalam rangka mendirikan sebuah stabilitas tatanan regional. Asia Tenggara melakukan *hedging* terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dominasi atau hegemoni Cina, penarikan diri Amerika dari kawasan ini dan ketidakstabilan tatanan di kawasan. Dalam hal ini, negara-negara anggota ASEAN mengumpulkan mitra

³⁵ Evelyn Goh, (2006) *Understanding "hedging" in Asia-Pacific Security*, Working paper yang diajukan pada Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawai pada tanggal 31 Agustus. Hal 1.

³⁶ Evelyn Goh, (2005), *Meeting the Cina Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*, Washington: East West Center Publications, Hal. 2-3.

³⁷ Evelyn Goh, (2007) "Great powers and powers and hierarchical order in Southeast Asia", *International Security Journal* , 32(3) hal.121

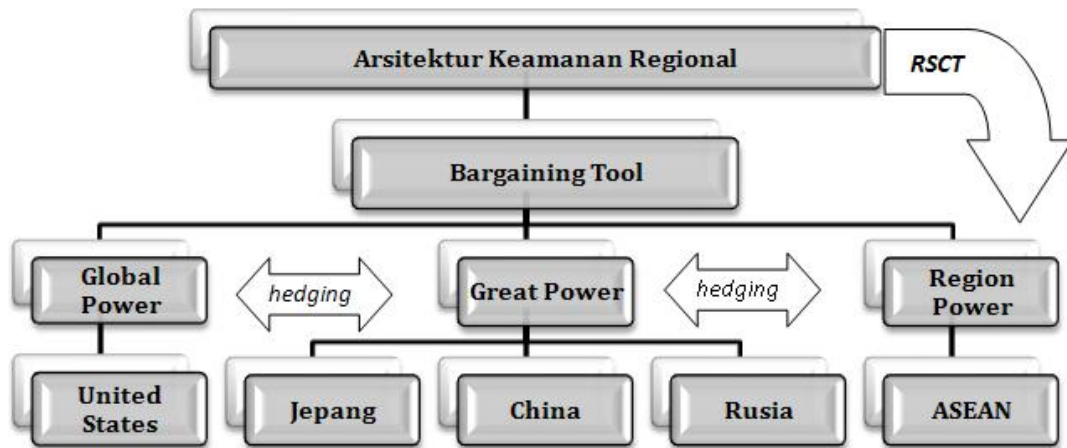
³⁸ Evelyn Goh, (2005), *op.cit.*, hal. 3-4.

³⁹ Evelyn Goh, (2006), *op.cit.*, hal. 2.

⁴⁰ Johnston dan Ross, (1999), dalam Kong dalam Evelyn Goh, (2005), *Meeting the Cina Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center, Hal 3.

partner sebanyak-banyaknya (Korea Selatan, Jepang, Canada, Australia, New Zealand, dan India) dalam ARF sebagai *observer* dalam penyelesaian masalah-masalah keamanan di tingkat kawasan.

IV. OPERASIONALISASI TEORI



V. PEMBAHASAN

Dalam transisi lingkungan strategis pasca-Perang Dingin di Asia pasifik, ASEAN telah membantu memudahkan proses tawar-menawar antara kekuatan-kekuatan besar di wilayah tersebut. Norma-norma di kawasan yang berupa “ASEAN Way” mengandung prinsip-prinsip non-intervensi, konsensus, inklusi, dan informalitas menjadi komponen yang sangat penting dalam tahap awal membawa kekuatan besar, terutama Cina dan Amerika Serikat untuk bergabung dalam ARF sebagai forum keamanan regional.⁴¹ Pada periode pasca-Perang Dingin, ASEAN membantu untuk melembagakan hubungan kekuasaan antara legitimasi peran kekuatan besar serta 'suara' dari negara-negara kecil dalam manajemen keamanan regional. Hubungan berkelanjutan pada kekuatan-kekuatan besar sangat diperlukan demi terciptanya suatu masyarakat regional baru yang stabil. Selain itu, ASEAN telah memberikan kekuatan-kekuatan besar tersebut suatu posisi normatif minimalis untuk mempermudah proses negosiasi atas permasalahan-permasalahan strategis.⁴² Dengan demikian, model regionalisme ASEAN dinilai paling ideal bagi kekuatan-kekuatan besar tersebut untuk melakukan strategi “*soft balancing*” atau “*hedging*” antara satu dengan yang lainnya.⁴³

Menurut teori *English School*, kerangka kerja ARF didasarkan norma asean way yang berlaku di Asia Tenggara. *ASEAN Way* dicerminkan dalam bentuk TAC (*Treaty of Amity Cooperation*) yang menghormati kedaulatan masing-masing anggotanya.⁴⁴ Perilaku para peserta ARF dipandu dan dilandaskan oleh norma-norma kooperatif tersebut.⁴⁵ Perilaku seperti inilah yang nantinya akan membangun lingkungan yang kooperatif dan stabil di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

⁴¹ Samuel Sharpe, (2003), “An ASEAN Way to security cooperation in Southeast Asia”, *the pacific review* 16(2): 232.

⁴² Evelyn Goh, (2011), “Institutions and the great power bargain in East Asia: ASEAN’s limited ‘brokerage’ role”, *International Relations of the Asia-Pacific* 11(3): 374.

⁴³ Evelyn Goh, (2005), *Great Powers And Southeast Asian Regional Security Strategies: Omni-Enmeshing, Balancing And Hierarchical Order*, working paper dalam Institute Defense And Strategic Institute Singapore, hal.2.

⁴⁴ Shaun Narine, (2006), *The English School And ASEAN*, *The Pacific Review* (19)2: 204.

⁴⁵ Hiro Katsumata, (2006), “Establishment Of The ASEAN Regional Forum”, *Pacific Review* 19 (2): 182.

Pada pertemuan ARF ke-9, Para menteri negara-negara anggota ASEAN menekankan bahwa hubungan yang stabil dan konstruktif antara negara-negara besar adalah kunci untuk perdamaian keamanan regional dan global. Mereka menyambut baik peningkatan kerjasama, dialog dan pertukaran kunjungan di tingkat tertinggi antara pemimpin di kawasan ini.⁴⁶ masalah keamanan yang juga melibatkan kekuatan eksternal juga dibahas dalam ARF walaupun masalah tersebut tidak melibatkan negara-negara anggota ASEAN. Perubahan dalam pendekatan ditegaskan kembali pada tahun 1996 oleh S. Jayakumar, menteri luar negeri Singapura: “for ASEAN, the issue now is not how to avoid entanglement in big power conflict. It is how to maintain a stable balance of the major powers at a time of immense fluidity.”⁴⁷ Disini Jayakumar menegaskan bahwa penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan eksternal demi stabilitas keamanan regional.

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara justru cenderung termarginalkan kepentingannya dalam membahas isu-isu internal kawasan.⁴⁸ Seperti contoh, dalam kasus dialog ARF, istilah “human security” yang berkaitan dengan perdagangan obat-obatan terlarang tidak digunakan dan diselesaikan segera dalam pernyataan Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2005. Hal ini, bagaimanapun, telah dimasukkan dalam dua dokumen *Inter-Sessional Support Group on Confidence Building Measure* pada sidang ARF tahun 2004.⁴⁹ Sebagai gantinya, pertemuan ARF tahun 2005 lebih fokus kepada konflik di semenanjung Korea, Laut China Selatan, keamanan maritim, dan terorisme.⁵⁰ Hal ini menjelaskan bahwa terdapat indikasi *heavily penetrated* oleh kekuatan ekstra regional dalam ARF. Sehingga eksistensi dari fungsi ARF tidak hanya ditentukan oleh *regional powers*, namun juga *extra-regional powers*.

Meskipun demikian, pada level regional, ASEAN Forum Regional (ARF) adalah contoh kunci dari strategi *soft balancing* yang melibatkan banyak kekuatan besar seperti halnya Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan juga Uni Eropa ke dialog keamanan regional.⁵¹ Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, terdapat negara-negara yang dikategorikan sebagai negara hegemon dan negara *balancer*. Goh menyatakan bahwa China dikategorikan sebagai negara hegemon di kawasan Asia Tenggara karena melihat agresifitas pertumbuhan dan sifatnya yang ekspansif di kawasan tersebut, baik dalam bidang pertumbuhan akuisisi ekonomi maupun modernisasi militer. Dalam hal ini Amerika Serikat muncul sebagai *lead balancer* demi menandingi pertumbuhan dan status quo China di kawasan tersebut.⁵²

VI. ANALISA

Arsitektur keamanan ASEAN dalam bentuk ARF merupakan satu-satunya forum dialog multilateral dalam kerjasama keamanan komprehensif di kawasan Asia Tenggara yang membahas masalah-masalah politik dan keamanan di kawasan. ARF merangkul negara-negara Asia Pasifik sebagai mitra wicara dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan masalah-masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara. Namun, dalam perkembangannya eksistensi ARF melemah karena fungsi utama ARF sebagai forum penyelesaian konflik dan perselisihan serta membangun rasa kepercayaan (*Confidence Building Measure* /CBM) di negara-negara Asia Tenggara justru digantikan dan disalurkan kepada mekanisme bilateral karena negara-negara anggota ASEAN menganut norma *ASEAN Way* yang mengedepankan mekanisme

⁴⁶ The Ninth ASEAN Regional Forum, (2002), *ASEAN Regional Forum Document Series*, ASEAN Secretariat.

⁴⁷ Allan Collins, (2003), *Security and Southeast Asia: Domestic, Regional, and Global Issues*, Singapore: Lynne Rienner Publisher, Hal. 172.

⁴⁸ Michael Wesley, “Asia-Pacific institutions”, dlm William T. Tow (ed.), (2009), *Security Politics in the Asia-Pacific: a Regional–Global Nexus?*, New York: Cambridge University Press, hal. 58.

⁴⁹ The Eleventh ASEAN Regional Forum, (2004), *ASEAN Regional Forum Document Series*, ASEAN Secretariat.

⁵⁰ The Twelfth ASEAN Regional Forum, (2005), *ASEAN Regional Forum Document Series*, ASEAN Secretariat.

⁵¹ Evelyn Goh, (2005), *Great Powers And Southeast Asian Regional Security Strategies: Omni-Enmeshing, Balancing And Hierarchical Order*, working paper dalam Institute Defense And Strategic Institute Sinapore, hal.2.

⁵² Evelyn Goh, (2005), *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*, Washington: East West Center Publications, Hal. 2-3.

informal untuk mencapai sebuah konsensus. Dengan demikian perkembangan prevalensi terhadap bilateralisme tidak dapat dihindari.

Meskipun demikian, eksistensi ARF dapat dibuktikan dengan dipercepatnya pembentukan ASC (ASEAN Security Security) sebagai *driving force* ARF yang sebelumnya akan dicapai pada tahun 2020 menjadi tahun 2015 setelah ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007. Eksistensi regionalisme tidak semata-mata ditentukan oleh *regional powers*, melainkan juga ditentukan oleh keterlibatan negara-negara besar di dalamnya. Meskipun negara-negara kawasan Asia Tenggara mempunyai peran penting dalam menggerakkan ARF, tetapi hal itu tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dari negara-negara mitra dialog yang juga meliputi Cina sebagai negara hegemon dan Amerika sebagai negara *lead-balancer* di kawasan Asia Tenggara.

ARF sebagai aktor regional melihat bahwa partisipasi dan kepentingan yang berkesinambungan dari Cina, AS, Jepang, Uni Eropa dan negara anggota lainnya akan mempertahankan momentum bagi multilateralisme keamanan. Mitra dialog disini tidak berperan hanya sebagai komponen pengawas. Masing masing komponen yang terdapat dalam ARF mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri. ARF digunakan sebagai *bargaining tool* oleh para anggotanya demi mencapai kepentingan tersebut. Masuknya negara-negara *super power* dan *global power* ke dalam ARF dilakukan secara *overlay*, dengan mengagendakan kepentingan kawasan yang menghasilkan dinamika interdependensi keamanan lokal terhenti, sehingga masalah keamanan kawasan terfokus pada kepentingan-kepentingan kekuatan besar dan pola persaingan kekuatan antara mereka. Norma *ASEAN Way* yang berlaku di ASEAN justru membuat kekuatan-kekuatan extra regional merasa “nyaman” karena bisa terlibat secara konstruktif dan penyelesaian masalah bisa dirundingkan secara damai (Laut Cina Selatan). Hal ini sesuai dengan argumentasi pelebagaan norma oleh teori *English School*

Kepentingan-kepentingan kekuatan besar tersebut diwujudkan dengan strategi *hedging* oleh negara-negara mitra dialog khususnya Cina dan Amerika yang berupa interaksi kerjasama keamanan kooperatif dalam ARF, demi mengcounter kekuatan-kekuatan yang berpotensi mempunyai ambisi hegemonial. ARF digunakan sebagai media dialog sekaligus media untuk melakukan kerjasama, tidak hanya di bidang politik dan keamanan, namun juga dalam bidang ekonomi. Seperti kepentingan Amerika dalam mengawasi ketegangan dalam pada Laut Cina Selatan serta kepentingan Cina dalam pengawasan terorisme dan pembajakan dalam jalur selat malaka demi keberlangsungan peredaran minyak bumi untuk peindustrian Cina.

Sedangkan, kepentingan negara-negara regional diwujudkan pula dengan strategi *hedging*, yaitu dengan menggunakan kebijakan-kebijakan preventif diplomasi dalam ARF untuk mencegah adanya ketidakstabilan sistem multipolar dalam kawasan Asia Tenggara. Serta membangun hubungan diplomatik yang baik antara negara *lead-balancer* dan hegemon. Strategi *hedging* juga digunakan oleh negara-negara di kawasan sebagai suatu cara untuk menyatukan (*engaging*) Cina dan Amerika agar tercipta hubungan yang baik diantara keduanya sehingga negara-negara regional dapat terhindar dari situasi anarki yang biasanya terjadi antara negara balancer dan hegemon. Arsitektur keamanan ASEAN dalam ARF memang dibangun untuk menampung beragam kepentingan dan pertimbangan kawasan. ARF akan dapat menjadi sebuah forum yang menjadi titik *convenient* bagi kotak-kotak diplomatik negara-negara besar di Asia Pasifik dengan catatan regional power dalam ARF dapat mempertahankan perimbangan yang stabil (*stable balance*) antara kekuatan-kekuatan besar didalamnya.

VII. KESIMPULAN

ARF sebagai aktor regional melihat bahwa partisipasi dan kepentingan yang berkesinambungan dari Cina, AS, Jepang, Uni Eropa dan negara anggota lainnya akan mempertahankan momentum bagi multilateralisme keamanan. Masing masing komponen yang terdapat dalam ARF mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri. ARF digunakan sebagai *bargaining tool* oleh para anggotanya demi mencapai kepentingan tersebut. Kepentingan-kepentingan kekuatan diwujudkan dengan strategi *hedging* oleh negara-negara mitra dialog khususnya Cina dan Amerika yang berupa interaksi kerjasama keamanan kooperatif dalam ARF, demi meng-counter kekuatan-kekuatan yang berpotensi mempunyai ambisi hegemonial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- [1] Acharya, Amitav. (2000). *Constructing Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge.
- [2] Acharya, Amitav. See Seng Tan (Ed). (2004). *Asia-Pacific Security Cooperation, National Interest And Regional Order*. New York: M.E. Sharpe, Inc.
- [3] Bandoro, Bantarto, (Ed.). (1996). *Agenda dan Penataan Keamanan Di Asia Pasifik*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- [4] Buzan, Barry. Ole Wæver. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*, New York: Cambridge University Press.
- [5] Collins, Allan. (2000). *The Security Dilemmas Of Southeast Asia*. London: Palgrave Macmillan Press.
- [6] De Wilde, Jaap Ole Wæver, Barry Buzan. (1998). *Security: A new Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher.
- [7] Frost, Ellen L. (2008). *Asia's New Regionalism*. Singapore: Lynne Rienner Publishers.
- [8] Goh, Evelyn. (2005). *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*, Washington: East West Center Publications.
- [9] Linklater, Andrew. et. al. (2005). *Theories of International Relations Third edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- [10] Luhulima, C.P.F. (2011). *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11] Mas'ood, Mochtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- [12] Tanaka, Hilton. Eka. A. (2011). *mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN*. Yogyakarta: Graha Ilmu..

Jurnal :

- [13] Acharya, Amitav. Richard Stubbs. (2006). "Theorizing Southeast Asian Relations: an Introduction". *The Pacific Review*. Vol. 19 No.2.
- [14] Alexandra, Lina A. (2010). "ASEAN di Tengah Multilateralisme Asia: Tantangan dan Peluang Bagi Sentralitas ASEAN". *ANALISIS CSIS*. Vol. 39 No. 4.
- [15] Buzan, Barry. (2003). "Security Architecture in Asia: The interplay of Regional and Global Level". *The Pacific Review*. Vol.16 No. 2.
- [16] Fuziatni, Yuli et. Al. (2005). "ASEAN SECURITY Community: Background and Prospect". *SOSIOSAINS*. Vol. 18 No. 2.
- [17] Goh, Evelyn. (2004). "The ASEAN Regional Forum in United States East Asian strategy". *The Pacific Review*. Vol. 17. no 1.
- [18] Goh, Evelyn. (2008). "Great powers and hierarchical order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies". *International Security*. Vol.32 No. 3.
- [19] Goh, Evelyn. (2008). "Hierarchy and the role of the United States in the East Asian Security Order". *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 8 No. 3.
- [20] Goh, Evelyn. (2011). "Institutions and The Great Power Bargain in East Asia: ASEAN's Limited 'Brokerage' Role". *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 11 No. 3.
- [21] Katsumata, Hiro. (2006). "Establishment of the ASEAN Regional Forum Constructing a 'Talking Shop' or a 'Norm Brewery'". *The Pacific Review*. Vol.19 No. 2.

- [22] Narine, Shaun. (1997), "ASEAN and the ARF The Limits of the 'ASEAN Way' ", *ASIAN SURVEY* Vol. 37 No. 10
- [23] Narine, Shaun. (2006). "The English School And ASEAN". *The Pacific Review*. Vol. 19 No. 2.
- [24] Ross, Robert S. (2006) "Balance of Power Politics and the Rise of China: Accommodation and Balancing in East Asia", *Security Studies* Vol.5 No.13.
- [25] Sukma, Rizal. (2005) "Multilateral Security Framework In Northeast Asia: A View From Southeast Asia". *The Indonesian Quarterly*. Vol. 33 No. 3.
- [26] Yuniarti, Anik. (2009). "ASEAN Way: Mekanisme "Cara ASEAN" dan Relevansinya". *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*. Vol. 1 No.1.

Dokumen Resmi :

- [27] Adam, Asvi Warman *et. al.* (1999). *Konflik Teritorial Di Negara-Negara ASEAN* , Laporan Hasil Penelitian LIPI.
- [28] ASEAN Selayang Pandang, (2007), Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Working Paper :

- [29] Goh, Evelyn. (2005). Great Powers And Southeast Asian Regional Security Strategies: Omni-Enmeshing, Balancing And Hierarchical Order, working paper dalam Institute Defense And Strategic Institute Singapore.
- [30] Goh, Evelyn. (2006). Understanding "hedging" in Asia-Pasific Security. Working paper yang diajukan pada Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawaii pada tanggal 31 Agustus.

Website :

- [31] ASEAN Security Community Plan of Action. diakses dari <http://www.aseansec.org/16826.htm> pada tanggal 11 November 2013.